

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran dipandang sebagai masalah serius karena menunjukkan ketidakmampuan perekonomian menyerap tenaga kerja secara optimal sehingga menekan output dan pendapatan masyarakat (Mankiw, 2007). Tingginya pengangguran juga berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial (Helvira & Rizki, 2020; Hadi, 2020). Blustein et al., 2020 menunjukkan bahwa individu yang kehilangan pekerjaan atau berada dalam kondisi kerja yang tidak pasti (*precarious work*) cenderung mengalami stres kronis serta penurunan kesehatan mental yang signifikan. Dalam makroekonomi, kondisi ini mencerminkan persoalan struktural seperti kualitas SDM dan *mismatch* keterampilan, yang bila berkepanjangan dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah (Simbolon, 2023).

Dalam konteks negara berkembang, pengangguran sering kali muncul sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif (Sukirno, 2008). Pembangunan ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, seperti industri manufaktur modern atau jasa berbasis teknologi, tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara luas karena proses produksinya cenderung padat modal dan minim penggunaan tenaga kerja (Todaro, 2000). Mankiw (2012) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat

menyebabkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja. Situasi ini diperparah oleh pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi serta ketimpangan distribusi lapangan kerja antarwilayah, sehingga tekanan di pasar tenaga kerja semakin meningkat (Sukirno, 2008).

Perubahan teknologi, globalisasi, dan integrasi ekonomi telah mengubah struktur pasar tenaga kerja secara signifikan (Borjas, 2016). Perkembangan teknologi digital membuka peluang kerja baru di sektor kreatif dan berbasis teknologi, tetapi juga mengurangi tenaga kerja di sektor tradisional akibat otomatisasi (Becker, 1964). Pergeseran ini menuntut peningkatan kualitas serta relevansi keterampilan agar tenaga kerja dapat beradaptasi terkait keperluan pasar yang berubah terus (Todaro & Smith, 2015).

Novitasari dan Putri (2026) menemukan bahwa belanja daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mempunyai pengaruh kepada tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa belanja sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan belanja sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan, dan belanja sektor ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan kepada tingkat pengangguran terbuka (Novitasari & Putri, 2026).

Fahira et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa

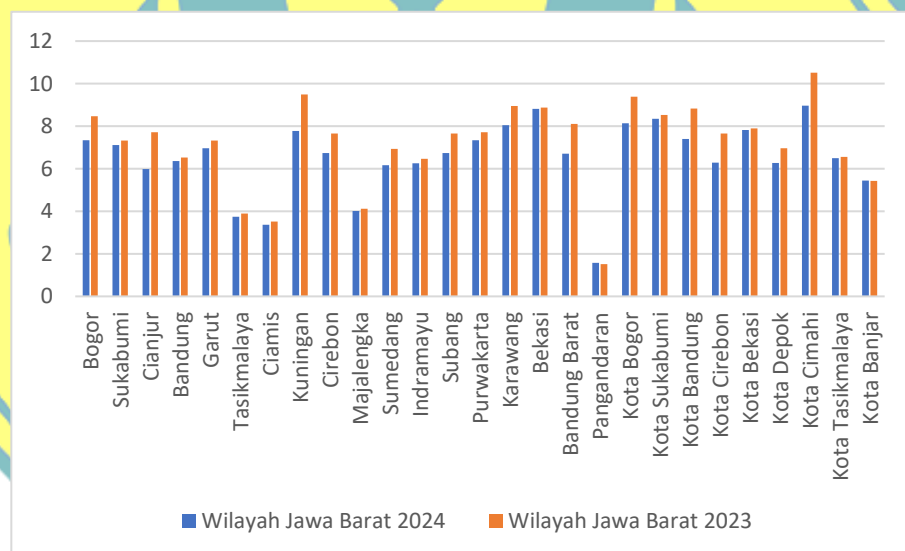
peningkatan realisasi belanja modal dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan aktivitas ekonomi yang mendukung penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pada beberapa wilayah pengaruh tersebut tidak selalu signifikan, yang menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal tergantung pada kualitas perencanaan serta implementasi kebijakan anggaran daerah.

Beberapa penelitian lain seperti Arizal dan Marwan (2019), Wulandari dan Marwan (2019), serta Soekapdjo et al. (2021) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pendidikan memiliki peran penting terhadap dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, namun bila tidak diimbangi oleh perluasan kesempatan kerja yang memadai bisa menimbulkan ketisamaan antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (*mismatch* tenaga kerja). Rahmawati et al. (2024) yang meneliti di Banten mengemukakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan kepada TPT. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang lebih baik bisa menekan pengangguran.

Ahmad Sahlan Hadi dan Riani (2022) menunjukkan bahwa tingginya tekanan di pasar tenaga kerja Jawa Barat dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka apabila perluasan lapangan kerja tidak dapat menyesuaikan pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu, Jawa Barat menjadi wilayah yang strategis untuk mengkaji faktor-faktor yang berefek pada tingkat pengangguran terbuka. Wilayah Jawa Barat sebagai provinsi dengan

jumlah penduduk dan angkatan kerja terbesar di Indonesia memiliki dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks, termasuk arus migrasi tenaga kerja yang tinggi dan konsentrasi industri yang besar (Badan Pusat Statistik, 2023). Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah rakyat terbesar di Indonesia sekaligus menjadi salah satu pusat industri manufaktur nasional, khususnya di wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Namun demikian, besarnya aktivitas industri tersebut tidak selalu diikuti oleh rendahnya tingkat pengangguran.

Dibawah ini adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka di tiap wilayah di Jawa Barat dari tahun 2020-2024 dalam bentuk persen :



sumber : BPS Jawa Barat (data diolah)

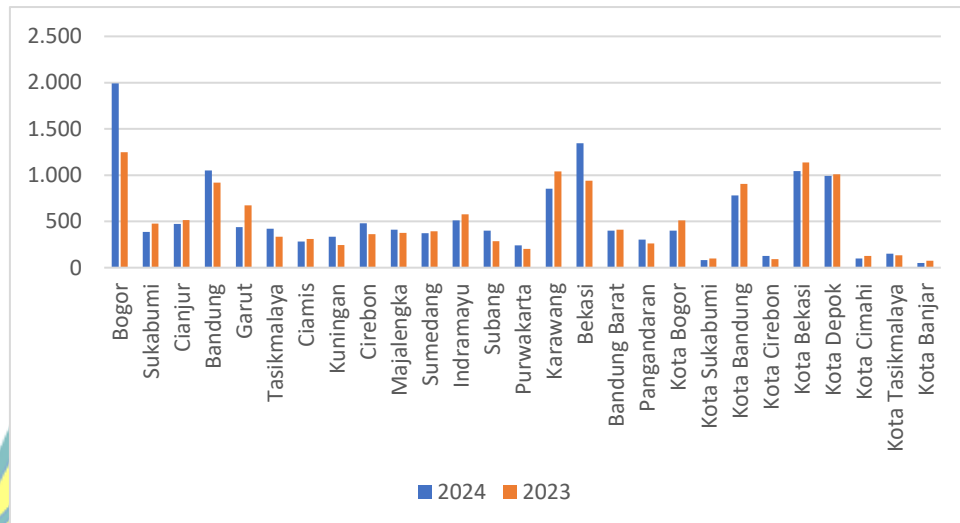
Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023–2024, kondisi pengangguran masih menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi antarwilayah. Daerah perkotaan dan kawasan industri seperti Kota Cimahi,

Kota Bogor, Bekasi, dan Karawang cenderung memiliki TPT yang relatif lebih tinggi, meskipun secara umum terjadi penurunan pada tahun 2024 seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, penurunan tersebut tidak merata karena wilayah industri tetap menghadapi tekanan akibat tingginya arus masuk pencari kerja dan selektivitas sektor industri dalam menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, daerah dengan struktur ekonomi berbasis pertanian dan sektor informal seperti Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar menunjukkan TPT yang lebih rendah dan stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengangguran di Jawa Barat masih bersifat struktural, dipengaruhi oleh perbedaan sektor ekonomi, tingkat industrialisasi, serta kemampuan masing-masing wilayah dalam menciptakan lapangan kerja.

Oseni dan Oyelade (2023) menjelaskan bahwa *capital expenditure* pemerintah merupakan instrumen fiskal krusial yang berpengaruh negatif serta signifikan kepada tingkat pengangguran. Hal ini berarti setiap peningkatan belanja modal akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sejalan dengan konsep Keynesian, pengalokasian anggaran untuk program pekerjaan umum seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sistem kereta api dapat menyerap tenaga kerja secara langsung sekaligus meningkatkan pendapatan *disposable* masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan alokasi anggaran

agar tepat sasaran pada sektor-sektor produktif yang mampu mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.



sumber : kementerian keuangan (data diolah)

Berdasarkan data TPT dan realisasi belanja modal tahun 2023–2024, tidak semua daerah dengan belanja modal tinggi secara langsung memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal tidak tentu dengan sendirinya menambah penyerapan tenaga kerja. Efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh jenis proyek yang dijalankan, apakah bersifat padat karya atau padat modal, serta seberapa besar keterkaitannya dengan sektor produktif daerah (World Bank, 2018; Todaro & Smith, 2015).

Sebaliknya, beberapa daerah dengan realisasi belanja modal yang relatif lebih rendah seperti Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar tetap menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif dikit serta stabil. Kondisi ini

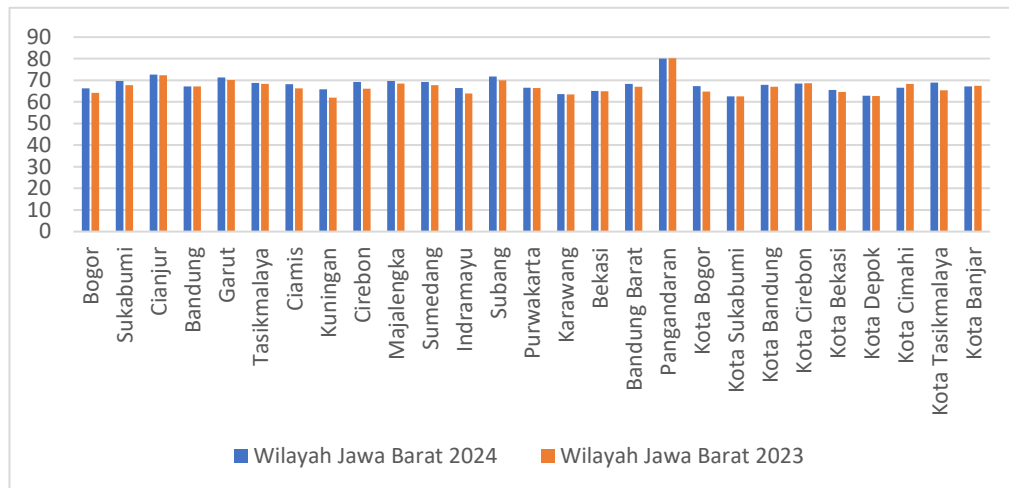
mengindikasikan bahwa faktor berbeda seperti struktur ekonomi daerah, dominasi sektor informal, serta skala kegiatan ekonomi lokal juga berperan dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, hubungan antara realisasi belanja modal daerah serta tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Jawa Barat bersifat tidak selalu linier. Meskipun secara teoritis belanja modal dapat menciptakan perluasan lapangan kerja, di praktiknya pengaruh tersebut banyak bergantung pada kualitas implementasi anggaran, efektivitas program pembangunan, dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Selain Realisasi Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ialah indikator penting yang memengaruhi dinamika ketenagakerjaan pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat karena menunjukkan banyak nya penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK menandakan semakin banyak penduduk yang bekerja atau mencari kerja, sehingga dapat berdampak berbeda kepada tingkat pengangguran terbuka di setiap wilayah.

Pada daerah dengan pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi, peningkatan TPAK dapat menurunkan pengangguran karena tersedianya kesempatan kerja yang memadai. Sebaliknya, pada daerah dengan keterbatasan penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK berpotensi meningkatkan pengangguran karena jumlah pencari kerja melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan TPAK yang tidak dibarengi oleh peningkatan

penyerapan tenaga kerja yang memadai cenderung akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (Simbolon et al., 2023).

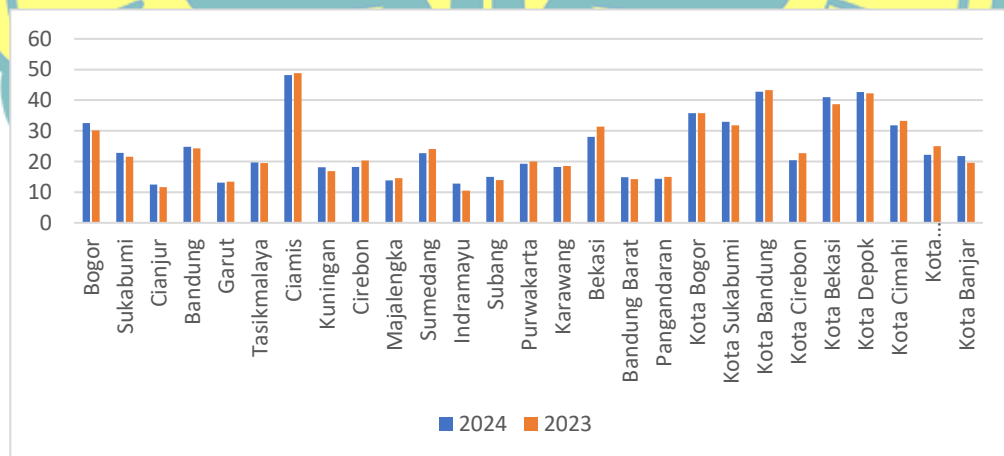


Sumber : BPS Jawa Barat (data diolah)

Berdasarkan data TPAK kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023–2024, terlihat adanya perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antarwilayah yang melihat karakteristik struktur ekonomi serta kesempatan kerja pada masing-masing daerah. Daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Kota Depok, dan Kota Bogor umumnya memiliki TPAK yang relatif tinggi seiring tingginya aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga persaingan di pasar tenaga kerja juga semakin besar. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, maka kondisi ini berpotensi meningkatkan pengangguran terbuka. Sebaliknya, daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan informal seperti Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar cenderung memiliki TPAK yang lebih tinggi serta stabil dan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah. Hal

ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK tidak selalu diikuti penurunan pengangguran, karena sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menyediakan dan menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga berperan dalam dinamika pengangguran di Jawa Barat melalui mekanisme peningkatan kualitas sumber daya manusia dan proses transisi lulusan ke pasar kerja (Wulandari & Marwan, 2019; Soekapdjo et al., 2021). APS yang tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk yang masih berada dalam pendidikan formal, sehingga dalam jangka pendek dapat menunda masuknya mereka ke pasar kerja dan menekan jumlah pencari kerja (Arizal & Marwan, 2019). Namun di sisi lain, tingginya APS juga dapat menimbulkan pengangguran terdidik apabila lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau sektor industri yang dominan (Tumilaar et al., 2022).



Sumber : BPS Jawa Barat (data diolah)

Merujuk pada sebaran data Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19–23 tahun di Provinsi Jawa Barat, variasi tingkat partisipasi pendidikan tinggi

mencerminkan karakteristik spasial ekonomi yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Struktur data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis mendominasi perolehan APS tertinggi sebesar 48,21%, diikuti oleh Kota Depok sebesar 42,69% dan Kota Bandung sebesar 42,74%. Tingginya angka partisipasi di klaster wilayah tersebut di satu sisi mencerminkan membaiknya kualitas sumber daya manusia, namun di sisi lain berpotensi memicu lonjakan penawaran tenaga kerja terdidik di pasar makro. Jika peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi tidak diselaraskan dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, maka dapat terjadi hambatan transisi menuju dunia kerja yang berpotensi meningkatkan pengangguran terdidik dan pengangguran struktural (Arizal & Marwan, 2019; Wulandari & Marwan, 2019).

Di lain pihak, kawasan pusat industri seperti Kabupaten Bekasi (28,02%) dan Kabupaten Karawang (18,26%) memperlihatkan tren partisipasi perguruan tinggi yang relatif moderat ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tarik sektor industri manufaktur di wilayah tersebut mungkin mendorong penduduk usia kerja untuk langsung memasuki pasar kerja pasca pendidikan menengah dibanding melanjutkan studi. Perbedaan dinamika antarwilayah ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan strategi pendidikan yang adaptif terhadap karakteristik industri lokal (Tumilaar et al., 2022; Rahmawati et al., 2024). Peningkatan APS jangka panjang tanpa diiringi oleh pemetaan kebutuhan sektoral usaha hanya akan menggeser beban masalah ketenagakerjaan menjadi

fenomena pengangguran terdidiik pada wilayah perkotaan dan pusat industrialisasi di Jawa Barat (Simbolon et al., 2023).

Menurut Arsyad (2016) peningkatan belanja modal daerah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Menurut Arsyad (2016), pembangunan infrastruktur melalui investasi pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dengan memperlancar mobilitas barang, jasa, dan faktor produksi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.. Fahira et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas belanja modal akan semakin besar apabila diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

World Bank (2018) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Efektivitas belanja modal dalam menurunkan pengangguran sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi program, efisiensi pengelolaan anggaran, serta karakteristik struktur ekonomi di masing-masing daerah. Dengan demikian, meskipun secara teoritis belanja modal berpotensi menurunkan pengangguran, dalam praktiknya hasil yang diperoleh dapat bervariasi antar daerah dan periode waktu.

Variabel pendidikan berperan penting dalam memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Soekapdjo & Oktavia (2021) menemukan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran. Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja sehingga memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan., sedangkan Tumilaar et al. (2022) menemukan pendidikan berpengaruh positif signifikan karena peningkatan jumlah lulusan tidak selalu diikuti ketersediaan lapangan kerja. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pengangguran bergantung pada kondisi pasar kerja. Namun, penelitian yang menggunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai variabel utama masih terbatas, karena pendidikan umumnya diukur melalui IPM atau rata-rata lama sekolah (Marliana, 2022; Rahmawati et al., 2024), padahal APS dapat menggambarkan besarnya penduduk usia sekolah yang masih berada dalam pendidikan dan potensi masuknya tenaga kerja baru ke pasar kerja (Arizal & Marwan, 2019; BPS, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara belanja daerah dan tingkat pengangguran terbuka, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik menyoroti peran realisasi belanja modal daerah sebagai instrumen utama dalam mendorong penyerapan tenaga kerja. Sebagian penelitian lebih banyak memfokuskan pada belanja daerah secara agregat atau sektoral, sehingga belum memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas belanja modal dalam menurunkan pengangguran.

Di sisi lain, penelitian sebelumnya umumnya belum mengombinasikan variabel kebijakan fiskal daerah dengan variabel pasar tenaga kerja dan pendidikan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka partisipasi sekolah, dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota serta keterbatasan periode penelitian juga menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan dinamika terkini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih komprehensif pengaruh realisasi belanja modal daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan angka partisipasi sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024.

Secara keseluruhan, pola data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) memiliki keterkaitan dengan dinamika pengangguran di setiap wilayah. Daerah dengan realisasi belanja modal yang tinggi tidak pasti memiliki TPT yang rendah, karena efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan pembangunan dan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Selain itu, daerah dengan TPAK tinggi cenderung menghadapi tekanan pengangguran yang lebih besar bila peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Di sisi lain, tingginya APS juga belum tentu mampu menurunkan pengangguran apabila kualitas serta relevansi pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta sektor industri.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Realisasi Belanja Modal Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024?
3. Bagaimana pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024.
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024.
3. Menganalisis pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperbanyak literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), khususnya dengan memasukkan variabel Realisasi Belanja Modal Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam satu model analisis. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat atau menguji kembali relevansi teori-teori ketenagakerjaan seperti Teori Klasik, Teori Pertumbuhan Endogen, Teori Borjas, *Human Capital Theory*, serta konsep *mismatch* dan *link & match* dalam konteks pasar tenaga kerja daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa membuat perspektif baru terkait peran APS yang masih jarang digunakan dalam penelitian pengangguran di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Informasi Kebijakan

Penelitian ini bisa membuat pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran. Dengan informasi tersebut, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan ketenagakerjaan, pengupahan, dan pendidikan yang lebih dapat berguna, adaptif, serta tepat sasaran dalam menurunkan pengangguran di kabupaten/kota Jawa Barat.

- Pengembangan Strategi Pendidikan dan Pelatihan

Dengan melihat pengaruh APS dan TPAK terhadap pengangguran, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan kerja untuk merumuskan program peningkatan kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini penting untuk mengurangi mismatch dan mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di era industri digital.

- Peningkatan Ketersediaan Pekerjaan

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berpengaruh kepada pengangguran, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi peningkatan kesempatan kerja, seperti pembangunan infrastruktur, perluasan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, serta pemberdayaan UMKM.

- Investasi yang Lebih Efektif

Dengan mengetahui daerah atau sektor yang paling sensitif terhadap perubahan Belanja Modal dan dinamika TPAK, hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh investor agar mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Investasi yang tepat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

- Peningkatan Efektivitas Program Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas program-program ketenagakerjaan seperti pelatihan kerja, Kartu Prakerja, atau program padat karya, apakah telah berkontribusi terhadap penurunan pengangguran atau perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang ingin mendalami dinamika pasar tenaga kerja, baik pada konteks lokal, provinsi, maupun nasional. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan metodologis bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin menggunakan analisis data panel dalam kajian ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan mengenai pengaruh variabel pendidikan yang lebih detail, distribusi industri antarwilayah, atau faktor sosial ekonomi lainnya dalam memengaruhi pengangguran.